

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lainnya di pulau Sumatera. Walaupun secara tertulis dalam bentuk angka Sumatera Barat memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah, tetapi angka tersebut justru berbanding terbalik dengan nilai indeks gini Sumatera Barat pada tahun 2017 yang terus meningkat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data kemiskinan yang relatif menurun dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus meningkat.

Ketimpangan pendapatan juga dikenal dengan nama disparitas pendapatan. Terjadinya ketidaksesuaian data antara angka kemiskinan dengan data ketimpangan pendapatan menjadi sebuah masalah serius yang harus dicermati, mengingat antara pertumbuhan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki korelasi yang positif. Disparitas pendapatan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat mengingat masing masing daerah kota dan kabupaten memiliki sumber daya alam yang berbeda beda. Selain itu keterbatasan lapangan pekerjaan serta lemahnya jiwa berwirausaha yang dimiliki masyarakat di Sumatera Barat mendorong terus terjadinya ketidakmerataan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di lingkungan masyarakat di Sumatera Barat tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Menurut Danawati dkk (2016) ketimpangan pendapatan

dapat dipengaruhi akumulasi modal, akumulasi modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia diperoleh data terlihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
Pada 19 Kota dan Kabupaten Di Sumatera Barat
Tahun 2013 – 2017 (Satuan dalam Poin)

No	Nama Kabupaten / Kota	Indeks Gini				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Mentawai	0.24	0.26	0.27	0.27	0.29
2	Pesisir Selatan	0.31	0.33	0.32	0.33	0.35
3	Sijunjung	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
4	Tanah Datar	0.21	0.21	0.23	0.24	0.23
5	Padang Pariaman	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30
6	Agam	0.29	0.32	0.33	0.32	0.33
7	Limapuluh Kota	0.31	0.33	0.32	0.33	0.32
8	Pasaman	0.22	0.24	0.26	0.24	0.27
9	Solok Selatan	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23
10	Dharmasraya	0.24	0.26	0.27	0.26	0.27
11	Kota Solok	0.31	0.33	0.32	0.33	0.32
12	Pasaman Barat	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
13	Padang	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39
14	Solok	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30
15	Sawahlunto	0.29	0.32	0.33	0.32	0.33
16	Padang Panjang	0.34	0.35	0.36	0.37	0.36
17	Bukitinggi	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
18	Payakumbuh	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23
19	Pariaman	0.31	0.31	0.32	0.33	0.32
	Rata Rata Sumatera Barat	0.25	0.27	0.28	0.29	0.30

Sumber BPS Sumatera Barat 2015

Pada tabel 1.1 terlihat terjadi fluktuasi nilai ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat, yang diukur dengan indeks gini. Pada tahun 2013 nilai indeks Gini rata rata yang dimiliki kota dan kabupaten di Sumatera Barat adalah sebesar 0,25 poin . Pada tahun 2013 nilai indeks gini tertinggi dimiliki oleh Kota Padang yaitu sebesar 0,40 poin sedangkan nilai indeks gini terendah dimiliki

oleh Kota Payakumbuh yaitu sebesar 0,21 poin Pada tahun 2014 yang lalu terjadi peningkatan rata rata nilai indeks gini kota dan kabupaten di Sumatera Barat menjadi 0.27 poin. Peningkatan indeks gini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat. Pada tahun 2014 tersebut kota dengan koefisien indeks gini tertinggi adalah Padang yaitu sebesar 0,40 poin sedangkan daerah kota atau kabupaten dengan nilai indeks gini terkecil adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Payakumbuh, masing masingnya memiliki koefisien gini sebesar 0,21 poin. Pada tahun 2015 yang lalu nilai rata rata indeks gini kota dan kabupaten di Sumatera Barat masih terus meningkat, ditahun tersebut nilai indeks gini Sumatera Barat adalah 0,28 poin, dengan kota Padang sebagai kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi yaitu mencapai 0,41 poin. Meningkatnya indeks gini yang dimiliki Padang menunjukkan terus meningkatnya jumlah ketimpangan pendapatan masyarakat yang terlihat dari pola konsumsi dan kualitas hidup masyarakat.

Memasuki tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan nilai rata rata indeks gini pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Peningkatan nilai indeks gini terjadi di Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 0.29 poin ditahun 2017 yang lalu. Kabupaten limapuluh kota yang mencapai 0.33 poin hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto. Jika diamati berdasarkan rata rata indeks gini teridentifikasi jumlah tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dalam hal ini hingga akhir tahun 2017 yang lalu nilai indeks gini Sumatera Barat adalah 0.30 poin lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Meningkat atau menurunnya indeks gini Kota Padang tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Menurut Olfie dkk (2016) ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, jumlah penduduk dan nilai investasi yang masuk kedalam sebuah daerah.

Menurut Samuelson (2009) tingkat partisipasi masyarakat, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat dengan memanfaatkan tingkat pendidikan formal yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan atau kesejahteraan yang dimiliki masyarakat. Semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan adanya distribusi pendapatan, serta adanya sejumlah lapangan pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat berdasarkan kelas pendidikan tertentu. Ketika angka partisipasi kasar terus meningkat maka kecenderungan ketimpangan pendapatan yang dapat diamati indeks gini akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian Rosa dkk (2016) menemukan bahwa angka partisipasi kasar berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil yang konsisten juga diperoleh oleh Arifin (2017) menemukan bahwa bahwa tingkat partisipasi kasar yang diukur dengan pendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Danawati dkk (2016) menemukan bahwa angka partisipasi kasar yang diukur dari masyarakat bekerja dengan level pendidikan formal SMA tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan masyarakat di Pulau Bali.

Disamping angka partisipasi kasar, meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bekerja. Menurut Sukirno (2012) jumlah penduduk menunjukkan besarnya jumlah masyarakat dari segala kategori usia. Semakin banyak jumlah penduduk menunjukkan banyaknya pengangguran, hal tersebut terjadi pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga ketika jumlah penduduk terus meningkat mengisyaratkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah daerah akan mengalami peningkatan.

Menurut Putri dkk (2013) menemukan bahwa jumlah penduduk bekerja berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan masyarakat di Indonesia. Hasil yang konsisten juga diperoleh oleh Rosa dan Sovita (2016) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hasil penelitian Adipurayanti (2015) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

Meningkat atau menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh investasi. Menurut Irawan (2018) investasi merupakan aktifitas yang dilakukan secara perorangan, sekelompok orang atau mengatasnamakan institusi untuk mengelola sebuah dana dalam rangka memperoleh suatu keuntungan di sebuah perusahaan atau pun daerah. Investasi ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan keterbukaan lapangan kerja, dan menciptakan aglomerasi dalam sebuah daerah. Terbukanya lapangan kerja dan kawasan aglomerasi akan mendorong menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian Sintia (2016) menemukan bahwa dengan menggunakan model data panel nilai investasi berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan. Hasil yang diperoleh terjadi karena semakin tinggi angka investasi yang masuk pada sebuah daerah akan memperbesar peluang bagi daerah untuk membuka lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat, serta mendorong berkurangnya disparitas pendapatan. Pada penelitian Wahyuni dkk (2016) ditemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai investasi yang masuk kedalam sebuah daerah akan membuka peluang bagi pemerintah untuk membuka lapangan kerja sehingga menciptakan pemerataan bagi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kepada uraian ringkas latar belakang penelitian serta adanya dukungan hasil sejumlah penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang direncanakan dilakukan di Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **Analisis Faktor Partisipasi kasar, Jumlah Penduduk yang Bekerja, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Padang**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah peneliti mengajukan sejumlah perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh partisipasi kasar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang?
3. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh:

1. Partisipasi kasar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang.
2. Jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang
3. Investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif :

1. Bagi pemerintah daerah hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis

dibidang perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan khususnya di Kota Padang.

2. Akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan permasalahan didalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian yang dilakukan saat ini terdiri dari sejumlah sub bab yang dapat dibuat kedalam sebuah sistematika yaitu:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan latar belakang mengambil judul, uraian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis merupakan bab yang menjelaskan tentang sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Pada bab ini juga akan diketahui keterkaitan antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen, serta adanya rumusan hipotesis dan model kerangka konseptual yang akan dipedomani dalam tahapan pengolahan data.

Bab III Metodologi Penelitian adalah bab yang akan menjelaskan tentang proses penentuan populasi, sampel, jenis dan sumber daya yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.